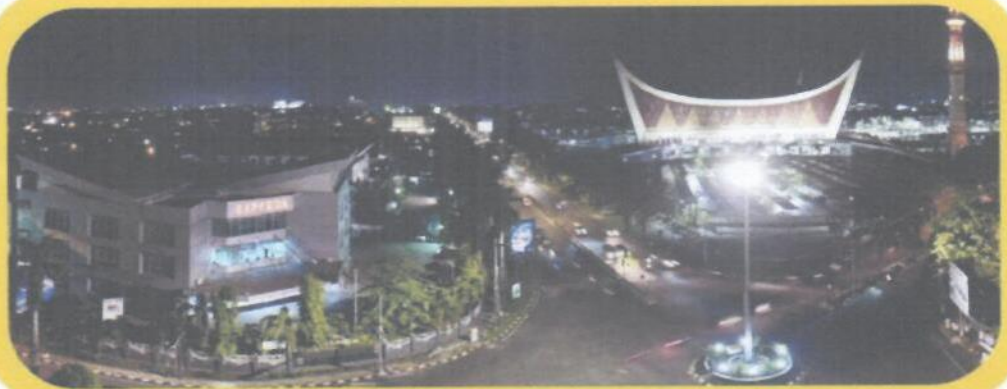


Bidang Infrastruktur dan Kewilayahann

2023

LAPORAN AKHIR KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT



KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Tahunan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur telah selesai dilaksanakan.

Laporan ini berisikan uraian pelaksanaan kegiatan, permasalahan dan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Dengan disusunnya Laporan Tahunan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran, masukan dan manfaat dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur untuk perbaikan pelaksanaan di tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini telah dilakukan sebaik mungkin, namun disadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam laporan ini. Untuk itu, kami mohon saran dan kritikan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Padang, 30 Desember 2023

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan



Rahmi Laila, S.Si, M.Si
NIP. 19810119 200604 2 003

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (*sustainable development*). Perencanaan sendiri merupakan salah satu dari aspek manajemen disamping pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan (*growth*), perbaikan (*improvement*), dan perubahan (*change*). Dengan demikian pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah upaya untuk eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya secara optimal untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan perubahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara perencanaan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pada UU tersebut dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) dengan periode 1 (satu) tahun.

Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan ditingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat pusat dan daerah.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di sektor infrastruktur dan pengembangan wilayah maka dilaksanakan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Melalui sub kegiatan ini diharapkan dapat menginventarisir permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi serta peningkatan sinergitas proses perencanaan dan sumber pendanaan lainnya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), APBN, Hibah dan sebagainya.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
3. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang;
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79)
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40);

1.2. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dari Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur adalah :

1. Mewujudkan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur antar perangkat daerah, pusat dan kabupaten/kota;
2. Mendukung perencanaan dan program kerja dari sumber pendanaan APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sumber pendanaan lainnya
3. Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan infrastruktur.

1.3. HASIL KEGIATAN

Hasil dari Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur adalah :

1. Meningkatnya sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan sektor infrastruktur antar perangkat daerah, pusat dan kabupaten/kota;
2. Terlaksananya Rapat Koordinasi terkait isu strategis lingkup infrastruktur antar perangkat daerah, pusat dan kabupaten/kota;
3. Terwujudnya sinergitas sumber pendanaan lainnya seperti DAK, APBN, Hibah dan sebagainya.

1.4. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Sub Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur :

1. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan sektor infrastruktur antar perangkat daerah, pusat dan kabupaten/kota;
2. Melaksanakan Rapat Koordinasi Danau Prioritas;
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan infrastruktur

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian Pendahuluan berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika penulisan

2. BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Pada bagian ini dipaparkan pelaksanaan kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

3. BAB III PERMASALAHAN

Bagian ini menjelaskan tentang indentifikasi permasalahan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

4. BAB IV PENUTUP

Penutup berisikan kesimpulan

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Sinergitas dan Harmonisasi Dokumen Perencanaan Sektor Infrastruktur Antar Perangkat Daerah, Pusat Dan Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) WS Batanghari

1. Sidang I Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) WS Batanghari TA 2023, 6 s.d 7 April 2023

1. Rekomendasi Sidang I TKPSDA WS Batanghari sebagai berikut:

- a) TKPSDA WS Batanghari merekomendasikan kepada instansi terkait atau pihak yang berwenang dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas air danau sipin;
- b) TKPSDA WS Batanghari merekomendasikan kepada instansi terkait atau pihak yang berwenang untuk menyusun master plan atau rencana induk pengembangan objek wisata Danau Sipin dengan melibatkan masyarakat setempat, Komunitas Peduli Danau atau Pokdarwis;
- c) TKPSDA WS Batanghari mendorong Komunitas Peduli Danau dan Pokdarwis yang mandiri dengan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi.



**2. Sidang II Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) WS Batanghari
TA 2023, 19 Juni 2023**

Adapun Agenda Sidang II TKPSDA WS Batanghari TA 2023 yaitu :

1. Serah Terima Jabatan Ketua TKPSDA WS Batanghari lama Bapak Medi Iswandi, ST., MM ke Ketua TKPSDA WS Batanghari
2. Paparan 1 oleh Subdit Perencanaan Teknis dan Kelembagaan, Direktorat Bina OP dan Pemeliharaan, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR Bapak Ir. Muhammad Mubarak, S.P. melalui Zoom Meeting mengenai Perumusan Pendayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA melalui TKPSDA WS
3. Paparan 2 oleh Bapak Ir. Dery Herwandy, S.T., M.T. mengenai Updating Pendayagunaan Kelembagaan Pengelolaan SDA TKPSDA WS Batanghari
4. Rapat komisi dan dilanjutkan dengan Penyusunan rekomendasi TKPSDA WS Batanghari



3. Sidang III TKPSDA Wilayah Sungai Batanghari TA.2023, 28-30 Agustus 2023

Adapun Agenda Sidang III TKPSDA wilayah sungai Batanghari TA.2023, yaitu:

1. Paparan I 29 Agustus 2023 disampaikan oleh Bapak Arif Ma'rufi, SP, M.Si. selaku Narasumber dari BMKG Stasiun Klimatologi Muaro Jambi dengan materi Persiapan menghadapi El Nino.
2. Paparan II 29 Agustus 2023 disampaikan oleh Ibu Tsabitah Aditya, ST., MPSDA selaku Narasumber dari Subdirektorat Perencanaan Teknis Operasi dan Kelembagaan, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR melalui zoom meeting dengan materi Penjelasan Tentang Rencana Alokasi Air Tahunan.
3. Paparan III 29 Agustus 2023 disampaikan oleh Ibu Dewi Yoesoef ST. selaku Narasumber dari PPK OP I, BWS Sumatera VI dengan materi Pelaksanaan RAAR dan Draft RAAT WS Batanghari.



4. Sidang IV TKPSDA WS Batanghari TA 2023, 18-19 Oktober 2023

Adapun tema dari kegiatan ini yaitu Sinkronisasi Program dan Kegiatan WS Batanghari serta Persiapan Menghadapi Resiko Intensitas Curah Hujan Tinggi.



5. Sidang V TKPSDA Wilayah Sungai Batanghari TA .2023, 14-15 November 2023

Adapun Agenda Sidang V TKPSDA Wilayah Sungai Batanghari TA.2023, yaitu:

1. Penyampaian hasil pelaksanaan TUSI dan Evaluasi TKPSDA WS Batanghari Periode II (2018-2023).
2. Sidang Pleno terkait pelaksanaan TUSI dan Evaluasi TKPSDA WS Batanghari Periode II (2018-2023).
3. Penyusunan rekomendasi untuk TKPSDA Periode III (2023-2028).
4. Penutupan masa tugas TKPSDA Batanghari Periode II (2018-2023).



Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) WS Kampar

1. Sidang Pleno I TKPSDA WS Kampar

Berdasarkan hasil Sidang Pleno IV Tahun 2022 yang telah disepakati tahun lalu, maka agenda pada Sidang Pleno I TKPSDA WS Kampar Tahun 2023 ini adalah membahas mengenai isu strategis yang berada pada Wilayah Sungai Kampar dengan **Tema : Penyelamatan Catchment Area di Hulu Wilayah Sungai Kampar** dan yang menjadi Ketua Sidang yaitu Kepala Balai Wilayah Sumatera III Pekanbaru, Bapak Ir. Sahril, Sp.PSDA didampingi Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan selaku Ketua Sekretariat TKPSDA WS Kampar, Ibu Reno Diah Putri, S.T.

LAPORAN AKHIR KOOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2023

Wilayah Sungai Kampar sendiri mengalir pada 2 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau, sehingga pada Sidang Pleno I ini telah disepakati untuk mengangkat 2 identifikasi permasalahan terkait catchment area yang berada di provinsi masing-masing, yaitu untuk di Provinsi Sumatera Barat mengenai alih fungsi lahan akibat adanya penambangan mineral dan batuan di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Lima Puluh Kota dan untuk yang berada di Provinsi Riau mengenai penyelamatan waduk PLTA Koto Panjang akibat alih fungsi lahan.



2. Sidang Pleno II dan III TKPSDA WS Kampar

Pada hari Selasa 29 Agustus 2023, Balai Wilayah Sungai Sumatera III, melalui PPK PSDA Ibu Putri Vinia Jaramenda, S.T., telah melaksanakan kegiatan Sidang Pleno II TKPSDA WS Kampar Tahun Anggaran 2023 yang bertempat di The Zuri Pekanbaru.

Pada Sidang Pleno II TKPSDA WS Kampar juga telah dilaksanakan Serah Terima Jabatan Ketua TKPSDA WS Kampar Periode I Kepengurusan Tahun 2023-2025 yang sebelumnya dijabat oleh Kepala Bappedalitbang Provinsi Riau menjadi Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat serta dihadiri secara langsung oleh Kepala Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, Bapak Muh. Arief Setiawan, M.T. dan Kepala Dinas SDA BK Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ir. Fatol Bari, M.Sc.Eng.

Sidang Pleno II TKPSDA WS Kampar ini membahas terkait Pendayagunaan Kelembagaan SDA pada Wilayah Sungai Kampar.

Selanjutnya pada hari Rabu 30 Agustus 2023, dilaksanakan Sidang Pleno III TKPSDA WS Kampar dengan pembahasan penyusunan Rencana Alokasi Air Tahunan WS Kampar Tahun 2023/2024. Sidang Pleno III TKPSDA WS Kampar ini juga telah dihasilkan Draft Rekomendasi Penyusunan RAAT WS Kampar yang selanjutnya akan ditandatangani oleh Ketua TKPSDA WS Kampar yang sekarang untuk dapat ditetapkan RAAT WS Kampar oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



3. S

LAPORAN AKHIR KOOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2023

Pada Sidang Pleno IV ini agendanya adalah penyelamatan Catchment Area WS Kampar dengan membahas 4 rekomendasi yang telah dihasilkan pada saat Rapat Pokja Isu Strategis Penyelamatan Catchment Area WS Kampar dan pada sidang pleno ini pembahasan dilakukan dengan memprioritaskan rekomendasi pada rapat pokja dan telah disepakati, yaitu :

1. Mendorong kajian perhitungan insentif Imbal Jasa Lingkungan (IJL) untuk Implementasi Imbal Jasa Lingkungan (IJL)
2. Membuat baseline data terkait catchment area PLTA Koto Panjang
3. Pemberian akses kelola kepada Masyarakat melalui program Perhutanan Sosial (PS)
4. Pembangunan Posko Digital Penegak Hukum Kehutanan



Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air TKPSDA WS Rokan

1. Sidang Pleno I TKPSDA WS Rokan

Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru, melalui PPK PSDA Ibu Putri Vinia Jaramenda, S.T mengadakan Sidang Pleno I Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Rokan (TKPSDA WS Rokan) TA 2023, bertempat di Hotel Prime Park Pekanbaru (21 Juni 2023).

Sidang Pleno I TKPSDA WS Rokan beragendakan Sosialisasi Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air (RPSDA). Sidang Pleno I TKPSDA WS Rokan dihadiri oleh 40 dari 52 anggota. Dalam sidang ini turut hadir beberapa orang narasumber dari Kementerian PUPR (Subdit KPPSDA dan Subdit Perencanaan Teknis dan Kelembagaan) serta Konsultan Individu BWS Sumatera III Pekanbaru.



2. Sidang Pleno III TKPSDA WS Rokan

Sidang Pleno Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) Wilayah Sungai Rokan DAS Rokan Tahun 2023/2024, dengan rekomendasi :

1. Alokasi air merupakan penjabatan air permukaan untuk berbagai keperluan pada suatu wilayah sungai dalam memenuhi kebutuhan air bagi para pengguna dari waktu ke waktu dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas air, berdasarkan asas pemanfaatan umum dan pelestarian sumber air.
2. Alokasi air telah memperhitungkan kebutuhan air untuk berbagai kepentingan dan ketersediaan air pada WS Rokan (DAS Rokan) secara adil, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melalui serangkaian sidang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Rokan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Skenario yang diputuskan adalah **Skenario Tahun Normal**.
 - b. Urutan prioritas pengalokasian air sebagai berikut (berdasarkan UU SDA No. 17 Tahun 2019):
 - 1) Hak Rakyat atas air (hak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota air sesuai dengan alokasi yang penetapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dan peraturan berlaku lainnya);
 - 2) Memperhatikan kebutuhan air keperluan air untuk pemeliharaan sumber air dan lingkungan hidup pada wilayah yang bersangkutan;
 - 3) Penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum;
 - 4) Kebutuhan usaha lainnya (industri lainnya).
 - c. Langkah yang perlu dilakukan bila terjadi defisit neraca air adalah:
 - 1) Koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan suplai air bersih bagi penduduk yang terdampak dengan penyediaan mobil tangki, pompa air dan sebagainya;
 - 2) Untuk memenuhi kebutuhan air irigasi perlu dilakukan pengaturan pemakaian air (rotasi/golongan) dengan memperhitungkan penambahan sarana dan prasarana penampungan air.
 - d. Berdasarkan hasil perhitungan neraca air pada DAS Rokan berdasarkan perhitungan Rencana Alokasi Air Tahunan 2023, adalah sebagai berikut:
 - 1) Ketersediaan air : **19.474 juta** juta m³/tahun,
 - 2) Kebutuhan air: **315 terdiri dari 57 pengguna** (PDAM/Industri/Irigasi)



Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air TKPSDA WS INDRAGIRI-AKUAMAN

1. Sidang Pleno I TKPSDA WS Indragiri-Akuaman

Tantangan pengelolaan Sumber Daya Air yang semakin meningkat akibat perubahan kondisi lingkungan membutuhkan strategi pengelolaan yang tepat dalam upaya konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air. Aspek konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air harus dikelola secara bersama-sama, baik antar sektor maupun antar lembaga agar tercipta koordinasi yang baik dalam pembuatan kebijakan di bidang Sumber Daya Air.

Integrated Water Resources Management atau Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu merupakan upaya pengelolaan sumber daya air dalam suatu konteks kesatuan wilayah sungai tanpa mengorbankan ekosistem yang di dukung oleh pelibatan stakeholder dalam bentuk pemberdayaan kelembagaan. Mengingat pentingnya peran stakeholder pengelola Sumber Daya Air dalam mewujudkannya, Menteri PUPR telah menetapkan anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Indragiri-Akuaman yang terdiri dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah di Sumatera Barat dan Riau yang berkaitan dengan sumber daya air guna mendukung keterpaduan pengelolaan SDA dalam bentuk perumusan kebijakan.

Kegiatan ini bertujuan untuk menjangring isu- isu strategis terkait pengelolaan Sumber Daya Air di WS.Indragiri-Akuaman. Agenda yang akan di bahas dalam sidang ini adalah Sosialisasi Rencana PSDA WS Indragiri-Akuaman dan program kerja TKPSDA WS Indragiri-Akuaman Tahun 2023.

2. Sidang Pleno II TKPSDA WS Indragiri-Akuaman

Sidang Pleno II TKPSDA WS Indragiri-Akuaman ini membahas terkait Pendayagunaan Kelembagaan SDA pada Wilayah Sungai Indragiri-Akuaman

4. Sidang Pleno III TKPSDA WS Indragiri-Akuaman

Berdasarkan Permen PUPR No. 17 tahun 2017, salah satu fungsi dari Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) WS. Indragiri-Akuaman adalah pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antar sektor, antar wilayah serta antar pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Indragiri-Akuaman.

Fungsi TKPSDA tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Sidang Pleno Ke-III TKPSDA WS Indragiri-Akuaman yang dilaksanakan untuk membahas antara lain Sidang pleno Pembahasan tentang Rancangan Alokasi Air Tahunan (RAAT) DAS Anai Tahun 2023, dan Pembahasan mengenai Aktivitas Galian C di WS Indragiri-Akuaman.



Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Batang Natal Batang Batahan (BNBB)

1. Sidang I Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Batang Natal Batang Batahan (BNBB) 15 Maret 2023 sampai 17 Maret 2023.

Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Batang Natal Batang Batahan (BNBB) menggelar Sidang perdana TKPSDA WS BNBB di Tahun Anggaran 2023 di Hotel Truntum, Padang. Sidang ini diselenggarakan selama 3 hari yang dimulai dari Rabu, 15 Maret 2023 sampai Jumat, 17 Maret 2023.

Sidang dibuka oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat Fathol Bari selaku Ketua Harian TKPSDA WS BNBB. Dalam sambutannya menyampaikan agenda yang dibahas dalam sidang ini merupakan *sharing story*.

“Berdasarkan Rapat Pimpinan TKPSDA WS BNBB yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2022, bahwa agenda sidang adalah membahas *sharing story* peranan organisasi masyarakat (Non Pemerintah) dalam pengelolaan sumber daya air di WS BNBB,”

Dipimpin Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat, Rahmad Yuhendra sidang berlangsung dengan masing-masing organisasi masyarakat menjabarkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan khususnya pada pengelolaan sumber daya air.

Staf Ahli Kesekretariatan TKPSDA WS BNBB, Dinsyah Sitompul menjelaskan dilakukannya *Sharing Story* untuk mengetahui tupoksi masing-masing lembaga non pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air.

Di Akhir Sidang dilakukan penyerahan piagam secara simbolis kepada Pimpinan Sidang yang diberikan oleh Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan SDA, Novita Rahmadani selaku Kepala Sekretariat TKPSDA WS BNBB. Penyerahan piagam tersebut dilakukan karena Sidang ini merupakan Sidang terakhir bagi Anggota TKPSDA periode 2018-2023.



LAPORAN AKHIR KOOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2023

Gas Rumah Kaca

Pembangunan Berketahanan Iklim : Konsep, Kategori Aksi, dan Metodologi

Sektor Air

Dampak Perubahan Iklim terhadap Sektor Air di Indonesia :

Peningkatan musim kemarau dan ketersediaan air beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas curah hujan yang akan mengakibatkan :

- Meningkatkan Potensi kekeringan
- Meningkatkan Potensi penurunan ketersediaan air

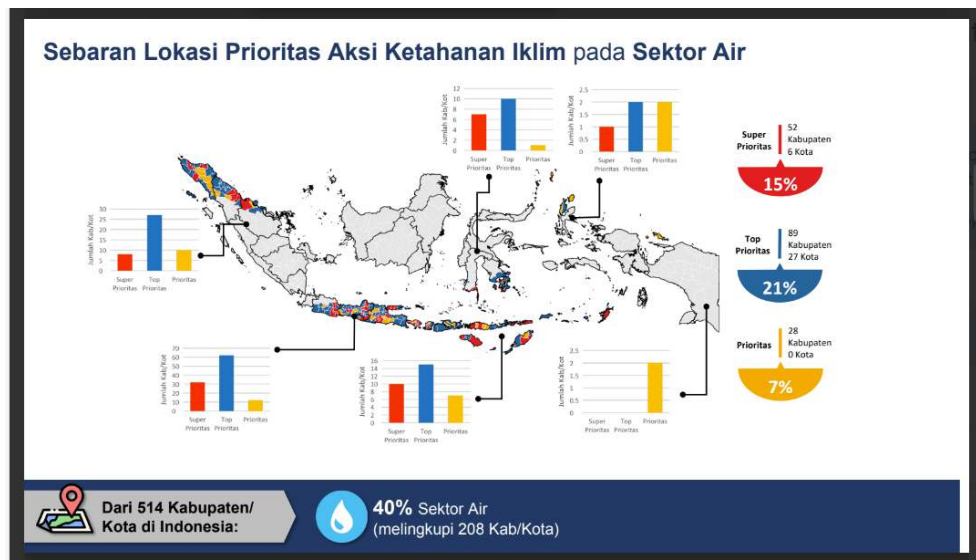
Proyeksi Iklim Indonesia menunjukkan kenaikan suhu pada tahun 2100 mencapai:

- 1.5°C dengan skenario RCP4.5
- 3.5°C dengan skenario RCP8.5

Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Bahaya Iklim Sektor Air : Sebanyak 12 provinsi dari 34 provinsi memiliki potensi kerugian ekonomi akibat bahaya iklim pada Sektor Air.

Definisi dan Pendekatan Aksi Ketahanan Iklim

“Aksi Ketahanan Iklim adalah tindakan antisipasi yang terencana ataupun spontan untuk mengurangi nilai potensi kerugian akibat ancaman bahaya, kerentanan, dampak, dan risiko perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat di suatu wilayah”



LAPORAN AKHIR KOOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2023

Daftar Aksi Ketahanan Iklim



SEKTOR AIR

Strategi: Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Pemenuhan Suplai Air Bersih dan Mitigasi Daya Rusak Air dari Potensi Bencana Iklim

Kelompok Aksi	Aksi	Kelompok Aksi	Aksi
Pengembangan inovasi dan teknologi perlindungan DAS Peningkatan kapasitas pemerintah terkait Sumber Daya Air	Kegiatan Inti Pembangunan bendungan Pembangunan embung Pembangunan dan penyesuaian media penampung air hujan untuk ketahanan bencana kekeringan Pembangunan tangki atau tandon air di wilayah pedesaan dan kepulauan yang terdampak kelangkaan air tawar karena kekeringan dan intrusi air laut Perlindungan dan rehabilitasi terhadap ekosistem lahan basah (contoh: penanaman dan pembangunan sekat kanal) Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif Penyediaan bibit vegetasi hutan berkualitas dan produktif Penerapan teknologi modifikasi cuaca (untuk mencegah kekeringan maupun dalam pengisian badan air seperti danau dan bendungan) Penerapan teknologi injeksi air dari genangan banjir Pembangunan sumbu resapan maupun aspal penyerap air (geopor) untuk mengatasi kelebihan limpasan air hujan untuk mencegah kekeringan	Penerapan teknologi daur ulang dan reklamasi air Pencegahan kehilangan air Penanganan banjir	Kegiatan Inti Penerapan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di wilayah kepulauan Penerapan teknologi daur ulang air limbah (water recycle) menjadi air bersih Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa Penerapan teknologi deteksi kebocoran pipa air Pembangunan dan penyesuaian infrastruktur sumber daya air untuk ketahanan bencana banjir Pembangunan drainase yang adaptif terhadap perubahan iklim (memperimbangkan peningkatan curah hujan/itik penangan air) Pembangunan pelindung tepian atau tebing sungai (dari beton maupun vegetasi) Pengerukan waduk, danau, sungai, dan saluran air

Daftar Aksi Ketahanan Iklim



SEKTOR AIR

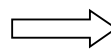
Strategi: Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Pemenuhan Suplai Air Bersih dan Mitigasi Daya Rusak Air dari Potensi Bencana Iklim

Kelompok Aksi	Aksi	Kelompok Aksi	Aksi
Pengembangan inovasi dan teknologi perlindungan DAS Peningkatan kapasitas pemerintah terkait Sumber Daya Air	Kegiatan Pendukung Pengembangan dan penerapan pendeteksi kerusakan ekosistem DAS berbasis teknologi informasi Pengembangan dan penerapan teknologi Online Monitoring untuk deteksi permukaan air sungai, muka air tanah, dan kerusakan/pencemaran lingkungan Pengembangan penantauan kerentanan sistem dan jaringan pasokan air terhadap dampak perubahan iklim secara realtime Pengembangan teknologi yang mereduksi pendangkalan sungai, waduk, bendungan dan penampung air lainnya Pengembangan teknologi ecohydraulic pada sungai Diseminasi sistem informasi kerentanan ekosistem penyedia air baku dan jaringan pasokan air Peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah terkait ketahanan iklim sektor air Penyelenggaraan bimbingan teknis standar infrastruktur sumber daya air yang adaptif terhadap perubahan iklim Pelatihan petugas operasi dan pemeliharaan (OP) bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya	Peningkatan kapasitas masyarakat terkait Sumber Daya Air Penguatan regulasi Sumber Daya Air	Kegiatan Pendukung Pendampingan konservasi dan efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air kepada rumah tangga Sosialisasi pemanfaatan teknologi pengolahan air berbasis desalinasi air laut dan air daur ulang Penyusunan kebijakan dalam pembatasan ruang khusus Kawasan Lindung Air Tanah Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Pengembangan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang sumber daya air

Pembangunan Berketahanan Iklim : Konsep dan Kategori Aksi Sektor Kesehatan

Dampak Perubahan Iklim di Indonesia

- Peningkatan suhu,
- Perubahan pola curah hujan
- Kelembaban
- Cuaca ekstrim



Peningkatan Kasus DBD, Malaria, dan Pneumonia

Sebaran Lokasi Prioritas Aksi Ketahanan Iklim pada Sektor Kesehatan

Lokasi Prioritas Ketahanan Iklim Sektor Kesehatan

Berdasarkan Demam Berdarah Dengue (DBD)



Demam Berdarah

- **Super Prioritas:** Kab. Pesawaran, Kab. Kab. Pandeglang, Kab. Kotabaru, Kab. Aor, Kab. Lembata, Kab. Malaka, Kab. Manggarai Barat, Kab. Teluk Wondama
- **Top Prioritas:** 48 Kab/Kota
- **Prioritas:** 49 Kab/Kota

Malaria

- **Super Prioritas:** Kab. Pesawaran, Kab. Alor, Kab. Malaka, Kab. Timor, Kab. Tengah Selatan, Kab. Maku Tenggara, Kab. Soram Bagian Barat, Kab. Jayapura, Kab. Membran, Kab. Jayapura, Kab. Nabire, Kab. Sarmi
- **Top Prioritas:** 25 Kab/Kota
- **Prioritas:** 49 Kab/Kota

Pneumonia

- **Super Prioritas:** Kab. Pandeglang
- **Top Prioritas:** 23 Kab/Kota
- **Prioritas:** 34 Kab/Kota

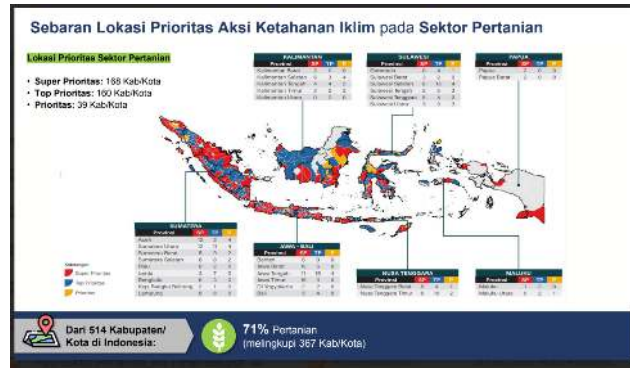
Dari 514 Kabupaten/ Kota di Indonesia:

32% Kesehatan (meliputi 165 Kab/Kota)

Pembangunan Berketahanan Iklim: Konsep, Kategori Aksi, dan Metodologi Sektor Pertanian

Dampak Perubahan Iklim terhadap Sektor Pertanian di Indonesia

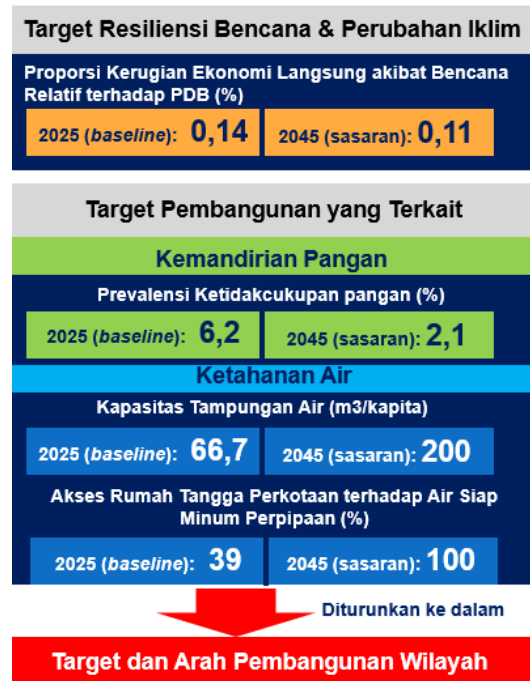
Peningkatan musim kemarau dan perubahan fisiologis tanaman padi $\Rightarrow$ Meningkatkan
Potensi penurunan produksi padi



Sektor Kesehatan

Pencegahan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) terhadap penyakit yang dipengaruhi oleh iklim di sektor kesehatan

Target Resiliensi Bencana & Perubahan Iklim



Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim Konvergensi Peningkatan Ketahanan Iklim dan Penanggulangan Bencana

Diperlukan transformasi dan transisi sistem untuk mengurangi kerentanan dan risiko terkait iklim menjadi Pembangunan

Manfaat Ketahanan Iklim :

- Pengurangan kerugian ekonomi (PDB)
- Penguatan Kapasitas Masyarakat menghadapi dampak bahaya perubahan iklim
- Menurunkan tingkat kerentanan wilayah
- Mengurangi tingkat Kemiskinan
- Kualitas lingkungan hidup membaik Implementasi Ketahanan Iklim
- Menentukan lokasi terdampak bahaya iklim & bencana pada level Kota/Kabupaten
- Merespon masalah bahaya iklim dengan strategi yang tepat pada tiap sektor
- Menentukan intervensi aksi sektoral pada lokasi prioritas

Danau Prioritas Nasional

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional,

- terdapat Strategi, Program dan Kegiatan yang diamanatkan untuk dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- tahun 2024 adalah tahun terakhir pelaksanaan Strategi, Program dan Kegiatan dimaksud, sehingga saat ini kita perlu bersama-sama mengevaluasi capaian implementasinya.

Hasil evaluasi menjadi masukan penting bagi penyempurnaan Program Penyelamatan Danau selanjutnya, dan bagi substansi teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Indonesia sebagai bagian dari negara-negara di dunia, berkomitmen untuk mengupayakan tercapainya agenda bersama yang terkait dengan air:

- Tahun 2020-2030 merupakan periode evaluasi pencapaian SDGs, dimana salah satu targetnya adalah perlindungan dan pemulihan ekosistem terkait air yang salah satunya adalah danau (Target 6.6),
- Tahun 2018-2028 merupakan dekade PBB untuk aksi “Air bagi Pembangunan Berkelanjutan”, dan
- Tahun 2021-2030 merupakan dekade PBB untuk aksi “Restorasi Ekosistem”.

Dengan memperhatikan pentingnya penyelamatan danau baik di dalam negeri maupun di negara-negara lain, menguatkan komitmen pada pencapaian SDGs, serta mengangkat momentum dekade PBB untuk aksi air dan restorasi ekosistem, Indonesia telah menginisiasi resolusi Sustainable Lake Management yang diterima oleh semua negara anggota PBB pada Sidang PBB Bidang Lingkungan Hidup atau UNEA ke-5 tahun 2022 di Nairobi, Kenya. Perlu saya garis bawahi bahwa upaya kita tidak berhenti sampai diterimanya resolusi, tetapi justru diharapkan menjadi spirit agar Indonesia dapat menunjukkan kepemimpinan, kinerja dan aksi-aksi terbaiknya dalam pengelolaan danau.

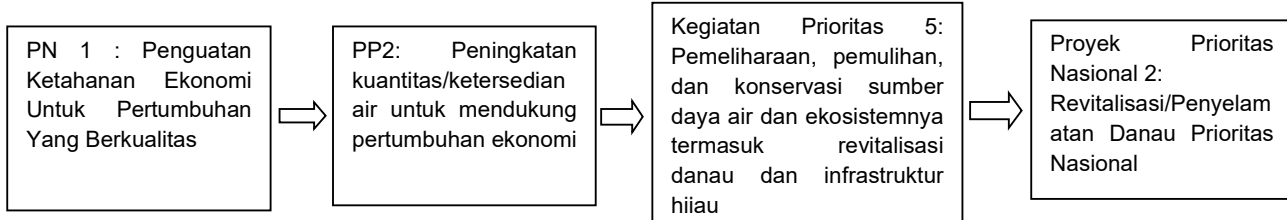


Permasalahan danau secara umum

- Pengurangan volume tampungan dan luas danau yang disebabkan oleh pendangkalan danau akibat laju sedimentasi yang tinggi dan okupasi sempadan danau yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Penurunan kualitas air danau akibat pembuangan limbah domestik dan industri, limbah pertanian pakan ikan dari aktivitas perikanan yang menyebabkan ledakan populasi alga;
- Kerusakan daerah tangkapan air danau; dan
- Penurunan keanekaragaman flora dan fauna yang spesifik.

LAPORAN AKHIR KOOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2023

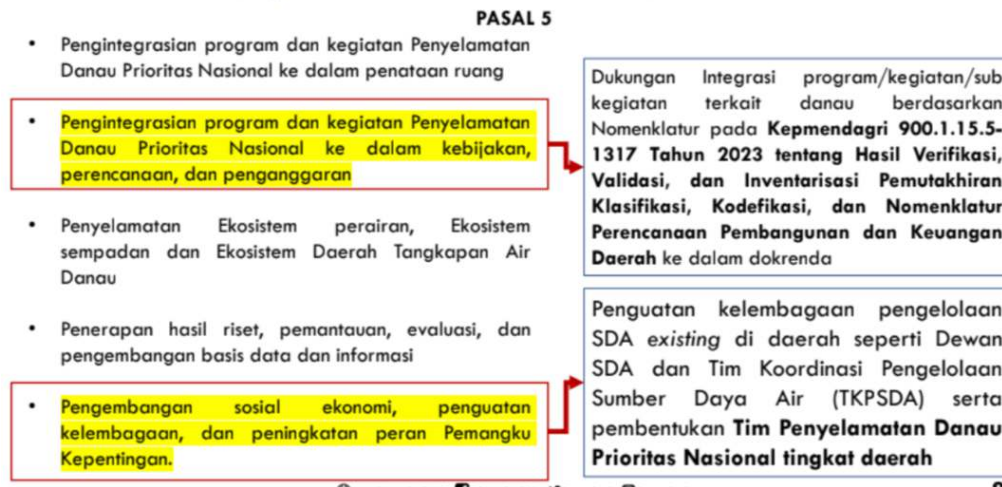
PERENCANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANAU DI DALAM RPJMN 2020-2024



Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terkait Penyelamatan Danau Prioritas

- Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- Urusan Pertanahan
- Urusan Perumahan Dan Permukiman
- Urusan Lingkungan Hidup
- Urusan Kehutanan
- Urusan Pertanian
- Urusan Pariwisata
- Urusan Kelautan Dan Perikanan
- Urusan Trantibum Dan Bencana

Strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional Perpres 60/2021 Tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional



Tugas Dan Peran Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional Tingkat Daerah Pasal 12

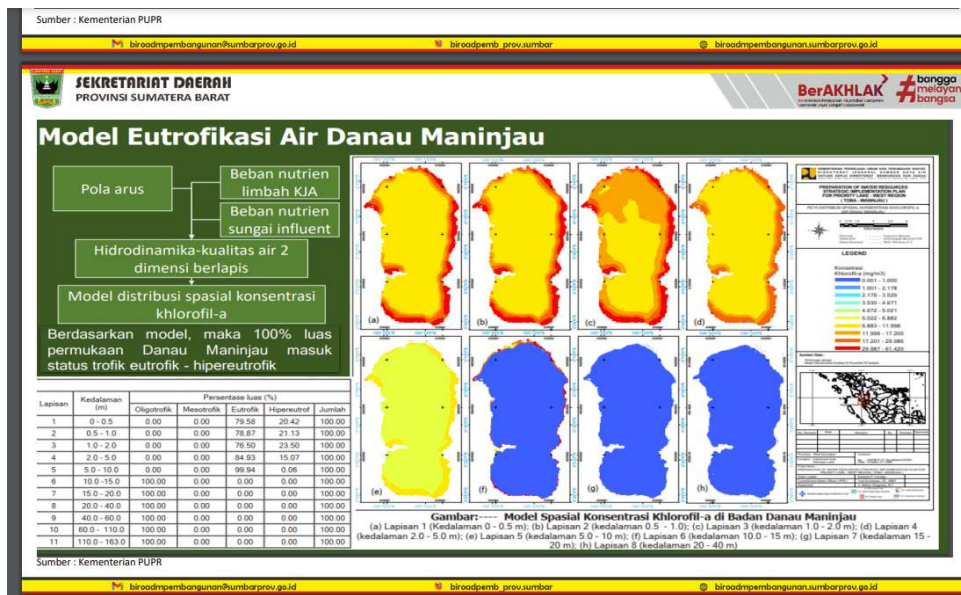
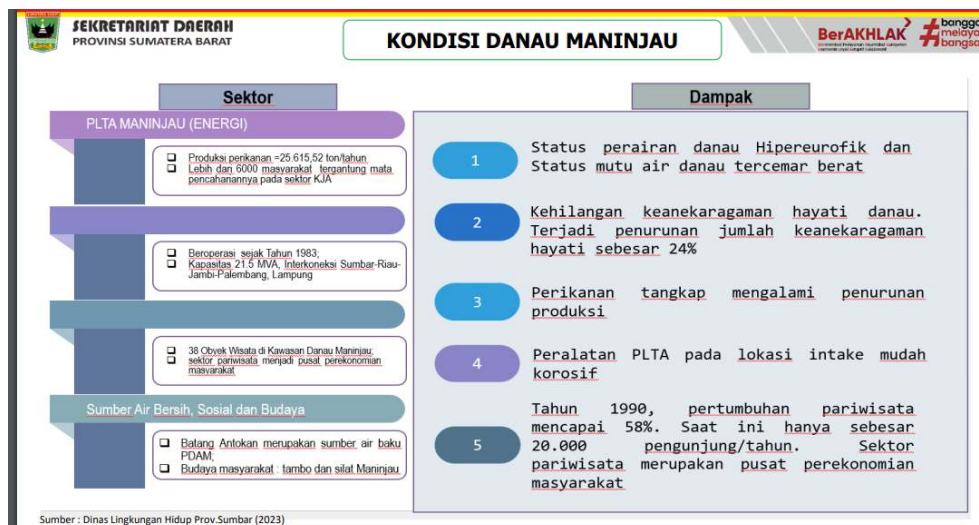
1. Melakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi tingkat daerah terhadap:
 - a. perencanaan dan penganggaran strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional
 - b. pelaksanaan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional
 - c. pemantauan dan evaluasi strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional
 - d. pembinaan dan pengawasan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional
2. Pemberdayaan kepada Pemangku Kepentingan di daerah untuk terlibat dalam Penyelamatan Danau Prioritas Nasional melalui kegiatan sosialisasi, konsultasi publik, dan partisipasi masyarakat
3. Merumuskan laporan pelaksanaan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional untuk disampaikan kepada Dewan Pengarah

Tahun 2018-2019 :

- a. Penyusunan RP Danau Maninjau (difasilitasi Baperlitbang Kab. Agam dengan dana BPDASHL Agam Kuantan)
- b. Penyusunan RP Danau Singkarak (Bappeda Prov. Sumbar dengan dana BPDASHL Indragiri Rokan)
- c. Tanggal 26 Maret 2019 : Penyerahan Dokumen RP Danau Prioritas dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekaligus penandatanganan kesepakatan dengan :
 - a. Gubernur Sumatera Barat tentang Penyelamatan Danau Singkarak
 - b. Bupati Agam tentang Penyelamatan Danau Maninjau

LAPORAN AKHIR KOOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2023

DANAU MANINJAU



LAPORAN AKHIR KOOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2023

SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT

UPAYA PENYELAMATAN DANAU MANINJAU

BerAKHLAK
Bersama-sama menciptakan perubahan

Melaksanakan Program Penyelamatan Danau Prioritas Nasional

Pembentukan Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional Provinsi Sumatera Barat melalui dikeluarkannya SK Gubernur No. 060/745 Tahun 2021

Surat Gubernur No.660/917/TL/DLH-2021 ke Bupati Agam perihal Rencana Aksi Pembersihan/Penyelamatan Danau Maninjau

Penyusunan Rencana Aksi Penyelamatan Danau Maninjau melalui memorandum KJA, pembersihan danau, pengendalian sampah, pengangkatan KJA, alih mata pencaharian serta pemulihan DAS.

Surat Gubernur No.660/235/TL/DLH-2022 ke Bupati Agam perihal Pengendalian KJA melalui Perizinan

Penerapan izin perikanan budidaya KJA oleh Pemkab Agam, pengurusan izin berpedoman pada peraturan RTRW Kab. Agam pada Peraturan Daerah No.5 Tahun 2014 yang berlaku selama zona perairan belum ditetapkan.

Surat Menteri PUPR selaku Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) perihal Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi DSDAN terkait Penanganan KJA di Danau Maninjau

DSDAN meminta Pemerintah Kab. Agam untuk segera menanggukuhkan penerbitan izin (moratorium) KJA baru di Danau Maninjau. PUPR melalui Ditjen SDA, KKP dan KLHK agar segera mengambil tindakan yang diperlukan guna pemulihan kualitas air Danau Maninjau dan penerbitan KJA

- Rapat Koordinasi antara Kapolda Sumbar, Balai Gakkum LHK Wilayah Sumbar dan BKSDA Sumbar untuk Menindaklanjuti Surat Moratorium**
- Kapolda siap membantu penerbitan KJA Danau Maninjau, dan pelaksanaan kegiatan pengangkatan seluruh KJA (zero KJA), memorandum KJA dan penataan Kembali sesuai dengan perizinannya.
- Program Alih Mata Pencaharian Masyarakat sekaligus Pemulihan Danau Maninjau**
- Pembangunan dan pengembangan kawasan Wetland di Danau Maninjau berbasis ekowisata untuk penyelamatan ikan endemik Danau Maninjau;
- Program pengolahan eceng gondok;
- Pelatihan budidaya maggot dan lebah madu galo-galo;
- Alokasi paket alat tangkap dan penyediaan sarana penangkapan ikan ramah lingkungan;
- Penyediaan bibit tanaman;
- Pengelolaan hutan rakyat; dan
- Pengembangan desa wisata di Danau Maninjau.
- Pemantauan Kualitas Air Danau Maninjau Tahun 2021-2023**

SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT

UPAYA PENYELAMATAN DANAU MANINJAU

BerAKHLAK
Bersama-sama menciptakan perubahan

(Tahun 2022)

1. Penyusunan Instrumen Pengendalian Danau Maninjau oleh Kementerian ATR/BPN
2. Penyusunan zonasi perairan danau oleh Kementerian ATR/BPN
3. Pembentukan Tim Penegakan Hukum Pengendalian KJA melalui Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 123 Tahun 2022
4. Pendataan Keramba Jaring Apung berbasis GIS (jumlah KJA = 23.359 petak)
5. Pekerjaan Daerah Irigasi Rambai dan Sungai Lakuak Bareno, Kecamatan Tanjung Raya
6. Pembuatan studi kelayakan kawasan Danau Maninjau oleh DPMPTSP Provinsi Sumbar (proses tender)
7. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi bioflok dari BBAT Jambi dalam rangka transformasi ekonomi
8. Gotong royong massal pembersihan danau secara periodik
9. Penyampaian surat Bupati Agam tentang moratorium KJA dan fasilitasi PPNS ke KLHK dan KKP
10. Pengembangan Desa Wisata di Kawasan Danau Maninjau (9 Nagari)
11. Kerjasama dengan BRIN terkait Pemanfaatan Gedung BRIN (LPI) sebagai Posko Penyelamatan Danau
12. Pelatihan pengolahan eceng gondok yang di fasilitasi oleh PLN dan Semen Padang

(Tahun 2023)

1. Pengendalian dan Penataan Keramba Jaring Apung sebanyak 3.000 unit
2. Pelaksanaan event budaya pariwisata dan geopark di kawasan Danau Maninjau
3. Normalisasi Batang Kurambik
4. Pembersihan eceng gondok menggunakan alat berat secara periodik (2.968 m³)
5. Pengembangan Desa Wisata di Kawasan Danau Maninjau (9 Nagari)
6. Penyusunan Peraturan Bupati Agam tentang Keramba Jaring Apung Ramah Lingkungan
7. Fasilitasi alih fungsi mata pencaharian melalui pertanian hortikultura dan perikanan budidaya darat (lele, mujair, ikan masi) dan URMK
8. Penguatan budaya dan adat istiadat melalui penyusunan kurikulum lokal dan pelatihan generasi muda
9. Pengolahan sampah melalui budidaya maggot
10. Operasional Posko Penyelamatan Danau Maninjau dan monitoring kualitas air
11. Gotong royong massal pembersihan danau secara periodik
12. Pengawasan perikanan keramba jaring apung

biroadpembangunan@sumbarprov.go.id
biroadpemb@sumbarprov.go.id
biroadpembangunan@sumbarprov.go.id

DANAU SINGKARAK

Permasalahan Danau Singkarak

NO	MASALAH	DANAU SINGKARAK
1	Daerah Tangkapan Air (DTA)	- DTA 129.000 Ha (18,60% hutan primer, 5,69% hutan sekunder) - Perubahan tata guna lahan yang memanfaatkan DTA oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan mengakibatkan tingginya erosi yang membawa sedimen masuk ke danau

**LAPORAN AKHIR KOOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2023**

2	Kerusakan Sempadan danau	- Bangunan perumahan, warung, restoran yang belum tertata dengan baik (10% yang memiliki IMB) - Pembuangan sampah di sempadan danau karena layanan sampah hanya di ibukota kabupaten dengan tingkat layanan Kab. Solok (24,53%) dan Kab. Tanah Datar (16,56%)
3	Kerusakan Perairan Danau	Status trofik Danau Singkarak berada pada status eutrofik (unsur hara tinggi tinggi)
4	Penurunan Keanekaragaman Hayati	Penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan (seperti : setrum aki, bahan peledak dan bagan) menurunkan kelestarian keanekaragaman hayati (contoh : ikan bilih)
5	Resiko Bencana	Terendahnya lahan pertanian masyarakat yang disebabkan naiknya elevasi muka air danau ketika inflow meningkat melebihi outflow tail race
6	Kelembagaan dan Sosial Ekonomi	a. Peraturan pengelolaan danau Implementasi Perda no.4/2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan serta Pergub 81/2017 tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak belum optimal diimplementasikan di lapangan serta rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian sumber daya perikanan. b. Kelembagaan formal Badan Pengelola Kawasan Danau Singkarak (BPKDS) yang ditetapkan melalui Kepgub Sumbar No.660-398-2011 belum optimal bekerja menjembatani persoalan yang dihadapi masyarakat selingkar danau c. Ketergantungan ekonomi masyarakat dari satu sumber yang terfokus pada penangkapan ikan bilih.

Kondisi Yang Diharapkan :

NO	MASALAH BIOFISIK	DANAU SINGKARAK
1.	Daerah Tangkapan Air (DTA)	memiliki tutupan lahan hutan minimal 30% dan memiliki laju erosi dan sedimentasi yang terkendali
2.	Kondisi Sempadan Danau	Menata kawasan sempadan danau (minimal 50 meter dari pinggir danau saat elevasi tertinggi) agar tidak digunakan sebagai kawasan permukiman
3.	Kondisi Kualitas Air Danau	mengembalikan status mutu kualitas air danau ke kategori cemar ringan dan tingkat kesuburannya menjadi mesotrofik: Mengurangi padat tebar ikan KJA, memasang alat penampung limbah KJA dan pengaturan waktu dan jumlah pemberian pakan ikan Mengalihkan usaha budidaya ikan di danau ke darat

4.	ondisi Keanekaragaman Hayati	erkembangnya ikan asli Danau Singkarak, terutama an bilih melalui membuat reservat serta domestikasi an restocking ikan asli.
5.	elembagaan dan Sosial konomi	eterlibatan masyarakat dan kearifan lokal

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANAU DALAM RTRW PROVINSI SUMATERA BARAT

Kawasan strategis Danau Singkarak merupakan salah satu obyek pariwisata alam andalan Provinsi Sumatera Barat, yang sudah lama dikenal baik oleh wisatawan manca negara maupun oleh wisatawan nusantara. Kawasan ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan alam sekitarnya, disamping dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangkit energi listrik

1. Pasal 38 ayat (1) huruf c:

Kriteria kawasan sekitar waduk/Danau dan situ adalah daratan sepanjang tepian waduk/danau dan situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk/danau dan situ sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat

2. Pasal 41

Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud.dalam pasal 36 huruf c meliputi :

- a. Kawasan cagar alam geologi adalah kawasan keunikan bentang alam berupa kawasan kasrt di daerah Danau Singkarak

3. Pasal 44 (ayat 8)

Rencana pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g memperhatikan Destinasi Pengembangan Pariwisata (DPP):

- a. DPP I, meliputi koridor Kota Bukittinggi, Kab. Agam, Kab, Pasaman, Kab. Lima Puluh Kota dan Payakumbuh
- b. Dominasi aktraksi budaya, belanja, MICE, kerajinan, kesenian, peninggalan sejarah Danau, pegunungan, serta flora dan fauna.

4. Pasal 46 ayat (1) huruf d

Rencana pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis meliputi :

- (1) Kawasan andalan yang ditetapkan secara nasional berdasarkan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 2008-2028) terdiri dari
 - d. Kawasan Solok dan sekitarnya (Danau Kembar diatas/dibawah, PIP Danau Singkarak, Lubug Alung, ketaping

5. Pasal 49 ayat (4) huruf m, n dan o

(4) Pengembangan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada (1) adalah kawasan strategis provinsi yang ditetapkan di provinsi meliputi :

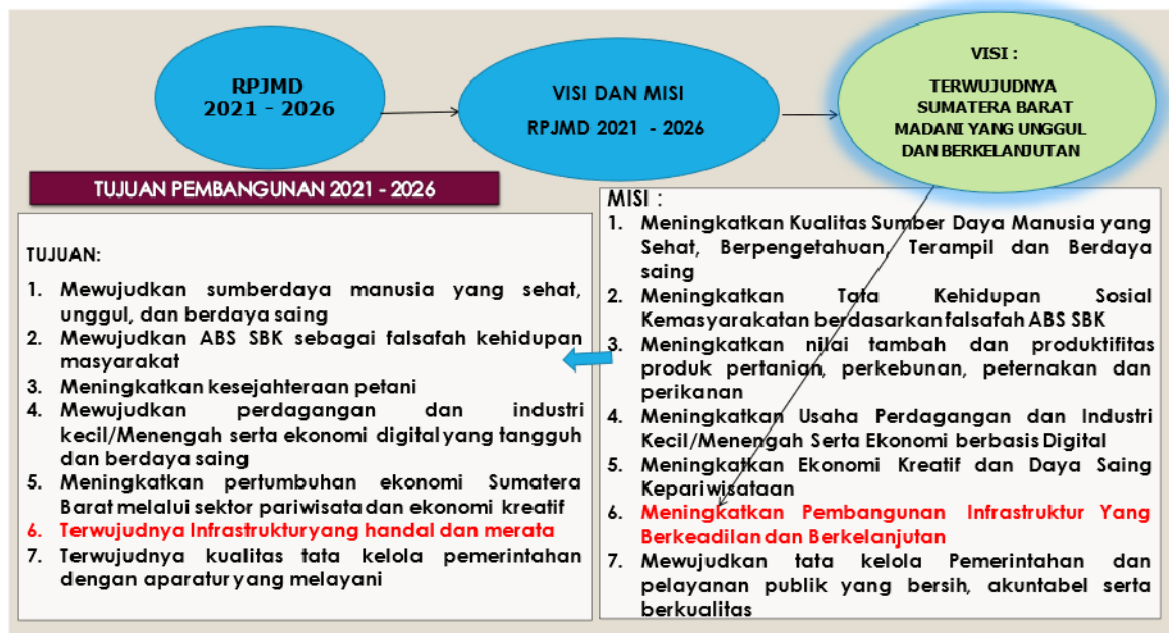
- m. Kawasan Danau Singkarak di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar
- n. Kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam
- o. Kawasan Danau Ditas dan Danau Dibawah dan Danau Talang di Kabupaten Solok

6. Pasal 65

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f ditetapkan sebagai berikut:

- dalam kawasan sempadan waduk /danau tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budi daya yang dapat merusak fungsi danau /waduk.
- dalam kawasan sempadan waduk /danau diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2021 – 2026 TERKAIT PENGELOLAAN



Bappeda@Prov.Sumbar

Target dan Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2021	TARGET 2026	TARGET 2024
Misi 6 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan						
Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	1. Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan	%	60	80	70
		2. Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya	Kab./Kota	19	19	19

Bappeda Prov. Sumbar

**LAPORAN AKHIR KOOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2023**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Upaya Penyelamatan Danau Prioritas Nasional Pada Urusan Bidang Terkait Dalam RKPD 2022, RKPD 2023 dan APBD TA 2022, APBD TA 2023

No	Kode Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dalam RKPD 2022	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dalam RKPD 2023	Perangkat Daerah/Penanggung Jawab
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok
2		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP/Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup / Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP/Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup / Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	DLH SUMBAR
3	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok
4			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT/ Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi/ Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok
5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok

 Bappeda Prov. Sumbar

No	Kode Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dalam RKPD 2022	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dalam RKPD 2023	Perangkat Daerah/Penanggung Jawab
6		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHAII) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi/ Sub Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHAII) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi/ Sub Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Lainnya	DLH SUMBAR
7	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok
8	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok
9	028/Bidang Kehutanan/Program Pengelolaan Hutan/ Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara/Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Program Pengelolaan Hutan/ Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara/Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Program Pengelolaan Hutan/ Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara/Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Dinas Kehutanan Prov. Sumbar
10	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok
11	6736/Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif	053/Kebun Bibit Rakyat, pada titik lokasi: 1. Kab. Solok a. Kec. IX Koto Sungai Lasi, Nagari Indur seluas 25 Ha b. Kec. Gunung Talang Nagari Koto Gedang Guguk seluas 25 Ha c. Kec. Kubung Nagari Salayo, seluas 25 Ha 2. Kab. Tanah Datar a. Kec. Rambatan, Nagari Balimbing seluas 25 Ha b. Kec. Batipuh Selatan, Nagari Padang Laweh Malak seluas 25 Ha	Kegiatan Kebun Bibit Rakyat, 1. Kab. Tanah Datar a. Kec. Batipuh Selatan, Nagari Padang Laweh Malak, seluas 25 Ha b. Kec. Batipuh Selatan, Nagari Guguk Malak, seluas 25 Ha	BPDAS Indragiri Rokan

 Bappeda Prov. Sumbar

**LAPORAN AKHIR KOOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2023**

No	Kode Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dalam RKPD 2022	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dalam RKPD 2023	Perangkat Daerah/Pemangku Jawab
	6736/Rehabilitasi Jalan dan Lahan Secara Vegetatif	5407.RDK.002 Gbit Der kualitas dan Dabit Produktif 052 Penyediaan Dabit Produktif pada titik lokasi : 1 Kab. Solok a. Kec. Bukit Sundi, Nagari Muara Panas seluas 3 Ha b. Kec. Kubung Nagari Salayo, seluas 0,5 Ha c. Kec. Bukit Sundi, Nagari Parempahan, seluas 0,5 Ha d. Kec. Lembang Jaya Nagari Koto Gadang Anau seluas 1 Ha e. Kec. Kubung Nagari Koto Hilalang seluas 0,5 Ha f. Kec. Bukit Sundi Nagari Muara Panas seluas 3 Ha g. Kec. Tanjung Harapan Nagari Laling seluas 1 Ha h. Kec. Lubuk Sikarah, Nagari Gumpang Rumbio, seluas 0,5 Ha i. Kec. Sikarah, Nagari Tancih Garam seluas 0,5 Ha 2 Kab. Tanah Datar a. Kec. Rambatan, Nagari Padenq Maqok seluas 1 Ha b. Kec. Batipuh, Nagari Gunung Rao seluas 3 Ha c. Kec. Rambatan, Nagari Rambatan, seluas 17 Ha d. Kec. Batipuh, Nagari Batipuan Beruah, seluas 0,5 Ha		BPDAS Indragiri Rokan
12	6734/Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis	0516 Bangunan Konservasi Tanah dan Air, pada lokasi: 1 Kab. Solok a. Kec. Danau Kembar, Nagari Kampung Batu Dalam berupa Dam Penahan (DPn) sebanyak 5 unit dan Gully Plug (GP) sebanyak 11 unit b. Kec. Lembang Jaya, Nagari Koto Gadang Koto Anau berupa Dam Penahan (DPn) sebanyak 15 unit dan Gully Plug (GP) sebanyak 19 unit c. Kec. Lembang Jaya, Nagari Koto Gadang Koto Anau berupa Dam Penahan (DPn) sebanyak 3 unit dan Gully Plug (GP) sebanyak 23 unit 2 Kab. Tanah Datar a. Kec. Batipuh Nagari Andaleh berupa Dam Penahan (DPn) sebanyak 2 unit dan Gully Plug (GP) sebanyak 13 unit		
		0516 Bangunan Konservasi Tanah dan Air, pada lokasi: 1 Kab. Solok a. Kec. Danau Kembar, Nagari Kampung Batu Dalam berupa Dam Penahan (DPn) sebanyak 5 unit dan Gully Plug (GP) sebanyak 11 unit b. Kec. Lembang Jaya, Nagari Koto Gadang Koto Anau berupa Dam Penahan (DPn) sebanyak 15 unit dan Gully Plug (GP) sebanyak 19 unit c. Kec. Lembang Jaya, Nagari Koto Gadang Koto Anau berupa Dam Penahan (DPn) sebanyak 3 unit dan Gully Plug (GP) sebanyak 23 unit		

 Bappeda Prov. Sumbar

No	Kode Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dalam RKPD 2022	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dalam RKPD 2023	Perangkat Daerah/Pemangku Jawab
13	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok
14	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok
15		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Sub Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Lainnya	DLH SUMBAR

 Bappeda Prov. Sumbar

RENCANA PENGELOLAANDANAU SINGKARAK

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Penataan Ruang Kawasan Danau Singkarak	Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi Danau Singkarak yang dilengkapi KLHS
2	Program Penyelamatan Ekosistem Lahan Sempadan Danau	1. Penentuan Daerah sempadan danau sebagai daerah perlindungan danau 2. Penertiban bangunan tidak berizin 3. Penerapan Izin Lingkungan dan IMB 4. Penyusunan Master Plan Geopark Danau Singkarak dan Sekitarnya 5. Pembangunan Monumen Tour de Singkarak 6. Pembangunan Kolam Ikan baru di Sempadan danau

Bappeda@Prov.Sumbar

NO	PROGRAM	KEGIATAN
3	Program Penyelamatan Ekosistem Perairan Danau Singkarak	1. Penyediaan Prasarana Sarana Sampah di Pemukiman 2. Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah 3. Pengendalian penceng gondok 4. Penghapusan budidaya ikan dengan karmba jaring apung 5. Pengembangan Program Pembinaan dan Percontohan Perikanan Ramah Lingkungan 6. Pengendalian Pencemaran dari lahan pertanian 7. Peningkatan ulang Amdal PITA Singkarak 8. Kajian Imbal jasa lingkungan dalam pelestarian sumber daya air
4	Program Penyelamatan DAS Dan DTA Danau	1. Penanganan lahan kritis erosi dan sedimentasi dan Pengendalian pertambangan galian C 2. Pengkayaan reboisasi hutan rakyat dan penghijauan lingkungan 3. Rehabilitasi Sempadan danau 4. Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air (KTA) 5. Rehabilitasi telaga di DTA 6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

Bappeda@Prov.Sumbar

NO	PROGRAM	KEGIATAN
5	Program Pemanfaatan Sumberdaya Air Danau Singkarak	1. Penghapusan alat tangkap Bagan dan Jaring insang dengan melakukan revisi Pergub No.81/2017 2. Pengembangan perikanan tangkap dan pembinaan kelompok nelayan perikanan tangkap/pengadaan perahu nelayan 3. Bantuan alat tangkap jaring insang mesh size $\geq$ 1 inci untuk menangkap ikan bilih 4. Pengembangan Budidaya Perikanan/ Fasilitas kelompok pembudidaya ikan /Kolam lele terpal 5. Pengawasan sumberdaya ikan dan lingkungan 6. Domestikasi dan pembenihan ikan endemic Danau Singkarak 7. Restocking ikan asli Danau Singkarak 8. Pembuatan reservat ikan di Danau Singkarak 9. Study Keaneka ragaman flora dan fauna

**LAPORAN AKHIR KOOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2023**

NO	PROGRAM	KEGIATAN
6	Program Pengembangan Sistem Monitoring, Evaluasi dan Informasi Ekosistem danau	1. Pemetaan potensi lingkungan biofisik, sosial ekonomi dan kelembagaan kawasan danau 2. Membangun sistem informasi berbasis teknologi informasi 3. Monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan kawasan danau berbasis teknologi
7	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan koordinasi	1. Peningkatan koordinasi antara pemangku kepentingan untuk penyelamatan Danau Singkarak (Kelompok Kerja) 2. Penguatan Forum Peduli Sumber Daya Air 3. Pembentukan kelembagaan masyarakat petani nelayan 4. Pendataan jumlah alat tangkap dan RTP perikanan

 Bappeda Prov. Sumbar

NO	PROGRAM	KEGIATAN
8	Program peningkatan peran dan partisipasi masyarakat	1. Sosialisasi dan penyadaran arti penting danau kepada masyarakat dan pengambil kebijakan 2. Pengembang kade lingkungan 3. Valuasi ekonomi kawasan danau singkarak 4. Pelatihan pengolahan makanan berbasis ikan 5. Pelatihan berbasis kompetensi pelatihan Processing, Pelatihan MTU Las Smau 3G, Pelatihan Menjahit Pakaian Dasar) 6. Pengadaan paket budidaya lele di kolam terpal 7. Pengembangan Nagari Mandiri Pangan 8. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif 9. Perluasan Tanam cengkeh 10. Perluasan Tanam Pinang 11. Bantuan Sarana Produksi bawang Merah 12. Workshop Peningkatan Karakter Lokal 13. Pembinaan dan Peringkat Sadar Wisata dan aksi Sapta Pesona 14. Peningkatan Kapasitas Usaha masyarakat di Destinasi wisata 15. Penyelenggaraan Iven/ Atraksi Wisata di sekitar Kawasan Danau Singkarak

 Bappeda Prov. Sumbar

LAPORAN AKHIR KOOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2023

DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (BAIK YANG TERCANTUM DALAM RP-DANAU MAUPUN BERDASARKAN KEBUTUHAN KEKINIAN)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PELAKSANA
1.	Percepatan dokumen RTR Kawasan Strategis Provinsi Danau Singkarak	Pemerintah Pusat
2.	Menjadikan kawasan Singkarak menjadi kawasan geopark nasional	Pemerintah Pusat
3.	Percepatan dan pengembangan program/kegiatan dalam rangka pengalihan mata pencaharian masyarakat dari danau ke darat seperti bioflok, agroforestry dengan peternakan dan pertanian dll.	Pemerintah Pusat
4.	Penentuan daerah sempadan danau sebagai daerah perlindungan danau serta perlu adanya kajian dalam BWSS V penetapan garis sempadan danau yang memuat/mengakomodir masyarakat yang telah lama bermukim di sepanjang sempadan danau	
5.	Kajian Imbal jasa lingkungan dalam pelestarian sumber daya air	BPDASHL Rokan Indragiri
6.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	BPDASHL Rokan Indragiri
7.	Studi keanekaragaman flora dan fauna di kawasan Danau Singkarak	BKSDA
8.	Penguatan Forum Peduli Sumberdaya Air	BWSS V
9.	Penyediaan fasilitas transportasi air	Pemerintah Pusat



BAB III

PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Kooordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Tahun 2023 telah diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi antara lain:

1. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif, tidak saja instansi teknis terkait namun juga P3A/GP3A, Komisi Irigasi dan TKPSDA. Lemahnya kelembagaan P3A karena sebagian besar belum berfungsi bahkan belum dibentuk atau dilakukan revitalisasi;
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan kelembagaan sumber daya air.
3. Banyak keramba apung yang tidak memiliki izin sehingga menimbulkan berbagai dampak buruk Banyaknya keramba jala apung (KJA) di Danau Maninjau
4. Terdapat banyak sisa pakan dan kotoran dari jutaan ton ikan yang ada di keramba yang mengakibatkan membuat air danau menjadi keruh dan sisa pakan mengendap di dasar danau
5. Terjadi perubahan bentuk bibir Danau Singkarak akibat reklamasi
6. Mengalami kerusakan daerah tangkapan air danau, kerusakan sempadan danau, kerusakan badan air danau, dan pengurangan volume tampungan danau
7. Pengurangan luas danau, peningkatan sedimentasi, penurunan kualitas air, dan penurunan keanekaragaman hayati yang mengakibatkan masalah ekologi, ekonomi, serta sosial budaya bagi masyarakat.
8. Masyarakat masih belum menyepakati batas sempadan danau dengan pemerintah
9. Berbagai upaya program dan kegiatan serta strategi dalam penurunan emisi gas rumah kaca perlu segera di percepat pelaksanaannya untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca melalui dukungan peraturan dan kebijakan serta perlunya pemecahan masalah terhadap kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya dan bagaimana mengatasinya.

**BAB IV
PENUTUP**

1. Keterbatasan infrastruktur dan belum adanya sumber-sumber air baru di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat menjadi sebagian kendala yang dihadapi Indonesia pada krisis air bersih.
2. Air merupakan bagian dari ekosistem. Sehingga, semakin rusak lingkungan maka semakin tinggi daya rusaknya. Permasalahan air mencakup mengenai kuantitas pada musim hujan dan kemarau serta kualitas dan distribusi. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia negara kepulauan dengan jumlah penduduk dan lokasi jatuhnya air hujan berbeda-beda di setiap daerah.
3. Pengelolaan sumber daya air terpadu esensinya adalah menyeimbangkan seluruh potensi. Keterpaduan antara hulu dan hilir tidak dapat dipisahkan. Air merupakan ekosistem, sehingga penanganannya harus holistik. Daerah catchment area di hulu tidak dibiarkan rusak.
4. Danau menjadi salah satu bagian dari ekosistem serta sumber air yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, ekologis serta memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat di Indonesia khususnya di Sumatera Barat. Saat ini, beberapa danau di Indonesia sudah dalam kondisi degradasi, baik berupa kerusakan daerah tangkapan air, sempadan danau, penurunan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, peningkatan erosi, dan punahnya jenis biota endemik.
5. Untuk mengendalikan kerusakan, menjaga, memulihkan serta mengembalikan kondisi danau maka diperlukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, serta harmonisasi antar kementerian / lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lain nya yang dilakukan secara terpadu melalui penyelamatan danau prioritas nasional.
6. Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang iklim bumi, terutama perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil. Gas yang dilepaskan ini akan menangkap panas di atmosfer dan menyebabkan peningkatan suhu global, yang menghasilkan berbagai dampak negatif pada kesehatan manusia, lingkungan, dan ekonomi.
7. Beberapa dampak negatif dari perubahan iklim menyebabkan bencana alam seperti badai, kekeringan, dan banjir, yang dapat menyebabkan kerugian jiwa dan kerusakan properti. Perubahan iklim juga mempengaruhi produktifitas pertanian dan keamanan pangan, karena pola cuaca yang berubah membuat sulit untuk menanam tanaman dan memelihara hewan ternak. Hal ini juga dapat menyebabkan penyebaran penyakit dan ancaman terhadap populasi manusia.
8. Untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim, perlu mengurangi emisi gas rumah kaca, terutama emisi karbon dioksida. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti mempromosikan sumber energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi deforestasi. Penting juga untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim dengan berinvestasi dalam infrastruktur yang dapat bertahan dalam peristiwa cuaca yang lebih ekstrem dan dengan menerapkan kebijakan yang melindungi populasi rentan.